

SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI DINAS
SOSIAL KOTA MATARAM**

*Analysis Of The Implementation Of Street Children, Beggars And Homeless
Protection Programs At The Mataram City Social Service*



OLEH :

FADIL NASTA'IN AKSA
NIM. 217110001

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS
SOSIAL KOTA MATARAM**

Oleh:

FADIL NASTA'IN AKSA

Untuk Memenuhi Ujian Sidang Skripsi
Tanggal 12 Februari 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Drs. H. Mustamin H. Idris, MS
NIDN.0031126484

Pembimbing II

M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP
NIDN.0804049501

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI DINAS
SOSIAL KOTA MATARAM

Oleh:

FADIL NASTA'IN AKSA
NIM. 217110001

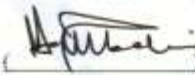
Telah Dipertahankan Didepan Peguji
Pada Tanggal 15 Februari 2021
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Mustamin H. Idris, MS**
NIDN.0031126484


Ketua

2. **M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP**
NIDN.080404950


Anggota

3. **Drs. Mintasrihardi, M.H**
NIDN.0830016101


Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik



v **Rahmad Hidavat, S.AP., M.AP**
NIDN: 0822048901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAN maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 10 Februari 2021
Mahasiswa



FADIL NASTA'IN AKSA
NIM: 217110001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadi Nastain Aksa
NIM : 211110001
Tempat/Tgl Lahir : Was. Tuwu, 09/05/1998
Program Studi : Adm. Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp/Email : 085239178597 / FadiWtuan@ummat.com

Judul Penelitian :-

Analisis Tentang Implementasi Program Perumahan
Anak Jalanan Galandangan dan Pengemis
Di Dinas Sosial Kota Mataram.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Senin 02-03-2021

Penulis


NIM 211110001

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos, M.A.
IDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Nastain Aksa
NIM : 21110001
Tempat/Tgl Lahir : Was. Tmu. 09-05-1998
Program Studi : Adm. Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp/Email : 085239178537 / Fadliw.tmu@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Tentang Implementasi Program Perlindungan Anak Jaranan, Galangangan, dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Senin 1-03-2021

Penulis



6000

Fadli Nastain Aksa
NIM 21110001

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

Melangkahlah!!!

“Kita harus tetap optimis mengerjakan hal yang produktif jangan berhenti hanya karena mendengar ocehan orang lain yang tidak pantas mendukung kita sebab jalan masih panjang

(Fadil Nasta'in Aksa)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtu. saya, saudara saya dan orang-orang tersayang disekeliling saya

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Impelementasi kebijakan tentang perlindungan anak. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan, namun berkat dengan doa, bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr H Muhammad Ali, M.SI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Drs. H. Mustamin H. Idris, MS, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP, selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama ini dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Kedua Orang Tua atas kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-Teman angkatan 2017 yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama berada di kampus tercinta. Khususnya para sahabatku IMM, BEM-U Periode 2017-2018, HMPS AP Periode 2019-2020, DPM-U Periode 2020-2021 dan Kelas A Jurusan administrasi publik yang selalu menyemangati, Serta Keluarga Besar yang saya Cintai, FK2M-NTB, KODIMM-MABAR, KBL-Mataram, dan memotivasi agar skripsi ini dapat selesai.
9. Kepala dinas Sosial Kota Mataram, yang telah memberikan bantuan berupa izin penelitian, dan data-data yang mendukung proses lancarnya Penelitian.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, oleh karena itu, penulis sangat menghargai dan berterimakasih atas saran dan kritik konstruktif yang diberikan guna kesempurnaan skripsi ini.

Mataram, 26 Februari 2021

Penulis

Fadil Nasta'in Aksa

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Mataram dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana implementasi program perlindungan anak jalanan, pengemis dan gelandangan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pengimplementasian program perlindungan yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Mataram melalui usaha-usaha kongkrit seperti usaha Usaha Preventif, usaha represif, dan Usaha Rehabilitatif. Dinas Sosial Kota Mataram berkoordinasi dengan wakil-wakil dari unsur pemerintahan, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi peneliti/akademisi. Jenis program perlindungan yang dilakukan adalah Penyuluhan sosial, Mendirikan pos pelayanan Gepeng dan anak jalanan, Melakukan Razia di tempat-tempat dimana gepeng dan anak jalanan itu sering berada, dan Kerja sama dengan Dukcapil, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kapolresta Kota Mataram, Dinas Pendidikan dan Yayasan Perlindungan Anak. Faktor yang mempengaruhi adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan yaitu latar belakang ekonomi keluar, *broken home*, dan faktor keturunan.

Kata Kunci: Program Perlindungan; Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan

ABSTRACT

This research was conducted at the Mataram City Social Service to know how to implement the street children, beggars, and vagabond protection programs and determine the factors that influence street children, beggars, and homeless people. This research used a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation, while the data analysis techniques used were qualitative data analysis. The research results on implementing the protection program carried out by the Social Service of Mataram City were through substantial efforts such as Preventive Efforts, Repressive Efforts, and Rehabilitative Efforts. The Mataram Social Service coordinates with government, law enforcement, community organizations, NGOs, and research / academic organizations. The protection programs carried out are social counseling, establishing service posts for street children, homeless people, and beggars, conducting raids in places where street children, homeless people, and beggars are often present, and collaboration with Dukcapil, Health Service, Ministry of Religion, Kapolresta Mataram City, Education Office, and Child Protection Foundation. The factors that influence street children, beggars, and homeless people are the family's economic background, broken home, and heredity.

Keywords: Protection Program; Street Children, Beggars, and Homeless



DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARTA TULIS	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
3. Manfaat Akademis	5
BAB II. KAJIAN TEORI	6
A. Pengertian dan Konsep Implementasi Program	6
1. Implementasi Program	6
2. Konsep Implementasi Program	8
B. Implementasi Kebijakan	12
1. Definisi Implementasi Kebijakan	12
2. Hakikat Implementasi Kebijakan	13
3. Pendekatan Implementasi Kebijakan	13
4. Pendekatan Rasional <i>Top-Down</i> dalam Implementasi Kebijakan	15
5. Pendekatan George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980).....	15

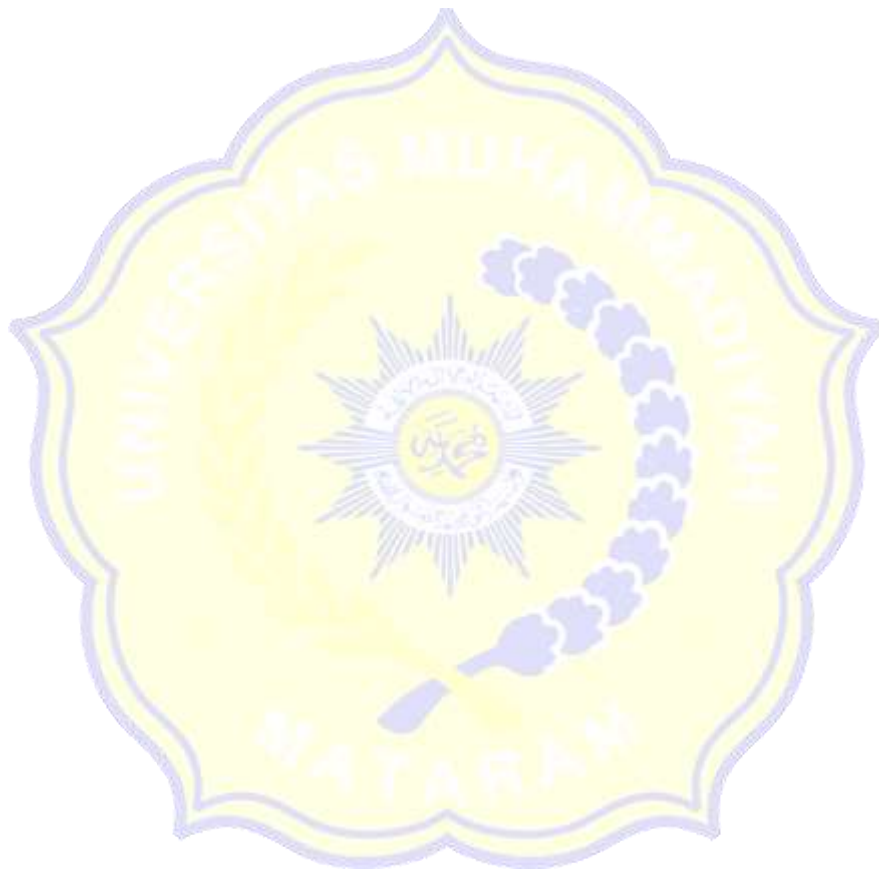
C. Konsep Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan	19
D. Penelitian Relavan	20
E. Keraangka Berfikir Penelitian	22
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	24
A. Rancangan Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Penentuan Informan dan Responden	25
D. Jenis Data dan Sumber Data	26
1. Jenis Data	26
2. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasai Penelitian	29
a. Lokasi Penelitian.....	29
b. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Mataram	30
c. Motto, Visi dan Misi	30
B. Implementasi Program Perlindungan Gepeng Dan Anak Jalanan...	31
1. Pelaksanaan Usaha Preventif	35
2. Pelaksanaan Usaha Represif	38
3. Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif	40
C. Faktor Adanya Gepeng Dan Anak Jalanan.....	42
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

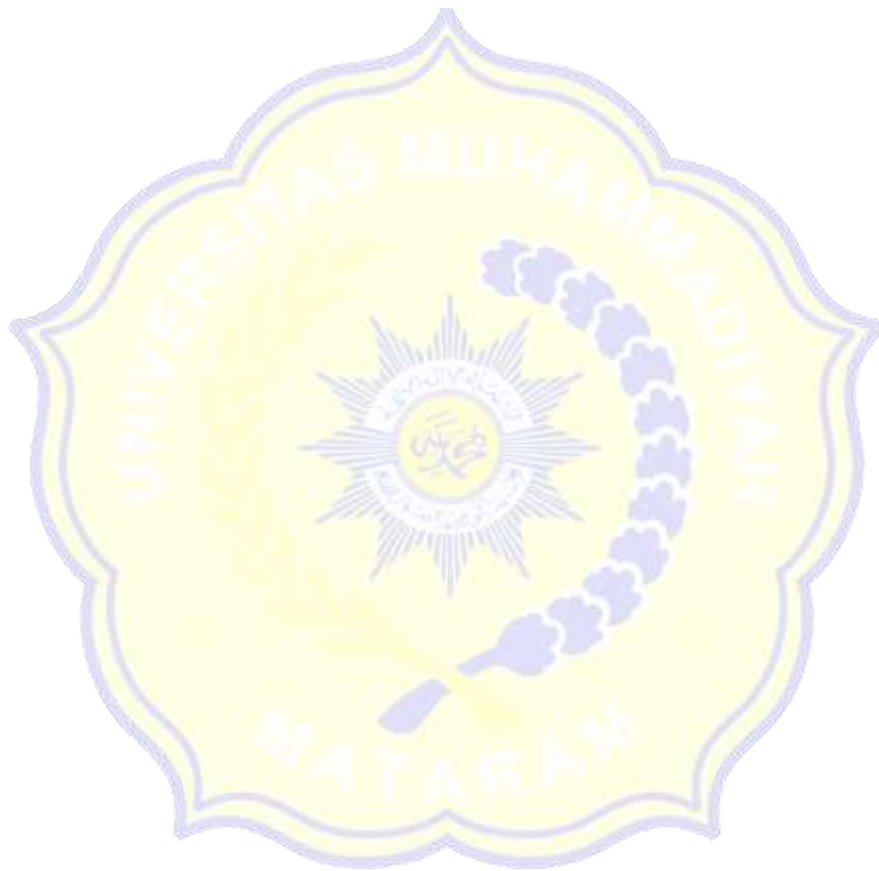
DAFTAR TABEL

1. Table 1. Rekapitulasi Data PMKS Terjaring Kota Mataram 3
2. Tabel 2. Rekapitulasi Data PMKS Terjaring Kota Mataram 37
3. Tabel 3. Latar Belakang Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan 45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program.....	10
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan Pengemis masih sering terlihat di wilayah Indonesia, terlebih di Kota Mataram. Kota Mataram merupakan Ibu Kota Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga merupakan pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Perkembangannya sangat pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya yang mendorong orang-orang untuk transmigrasi.

Masalah sosial seperti anak jalanan, pengemis dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus perpindahan dari daerah pedesaan ke kota, sehingga terjadi kepadatan penduduk. Sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyaknya yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa hidup di jalanan dengan menjadi gelandangan dan pengemis.

Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial anak jalanan, pengemis dan gelandangan sangat penting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Undang-Undang Dasar Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pemerintah kota Mataram menetapkan regulasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat meminimalisir perkembangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta dapat memberikan pekerjaan dan pembinaan. Dengan demikian implementasi dari program tersebut dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Kota Mataram.

Peraturan Daerah Kota Mataram yang telah dibuat dalam upaya perlindungan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat mengurangi angka pertumbuhannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif atau belum maksimal, sehingga dapat dilihat dengan tidak sesuai implementasi program yang baik.

Berdasarkan realita lapangan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum maksimal diterapkan. Karena masih dijumpai anak jalanan,

gelandang, dan pengemis yang berkeliaran di Kota Mataram, sehingga mengganggu ketertiban umum. Kehadiran anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menjadi sebuah permasalahan serius yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dari meningkatnya masalah sosial anak jalanan, pengemis dan gelandangan dapat dibuktikan berdasarkan data PMKS yang terjaring semenjak tahun 2018 sampai 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 43,03%.

TABEL 1
REKAPITULASI DATA PMKS TERJARING KOTA MATARAM

No.	Jenis PMKS	Tahun	Jumlah
1.	Anak Jalanan	2018	58
2.	Gelandangan		0
3.	Pengemis		94
Jumlah			152
1.	Anak Jalanan	2019	66
2.	Gelandangan		6
3.	Pengemis		153
Jumlah			225

Sumber: DINSOS Kota Mataram, 2020

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Mataram NTB tentang banyaknya masalah sosial anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih belum mendapatkan hak seutuhnya sebagai warga yang diamanatkan sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Mataram”.

F. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Dinas Sosial Kota Mataram?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Mataram?

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program perlindungan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Dinas Sosial Kota Mataram?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Mataram?

H. Manfaat Penelitian

4. Manfaat Teoritis

berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi sebagai pengembangan pada ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik.

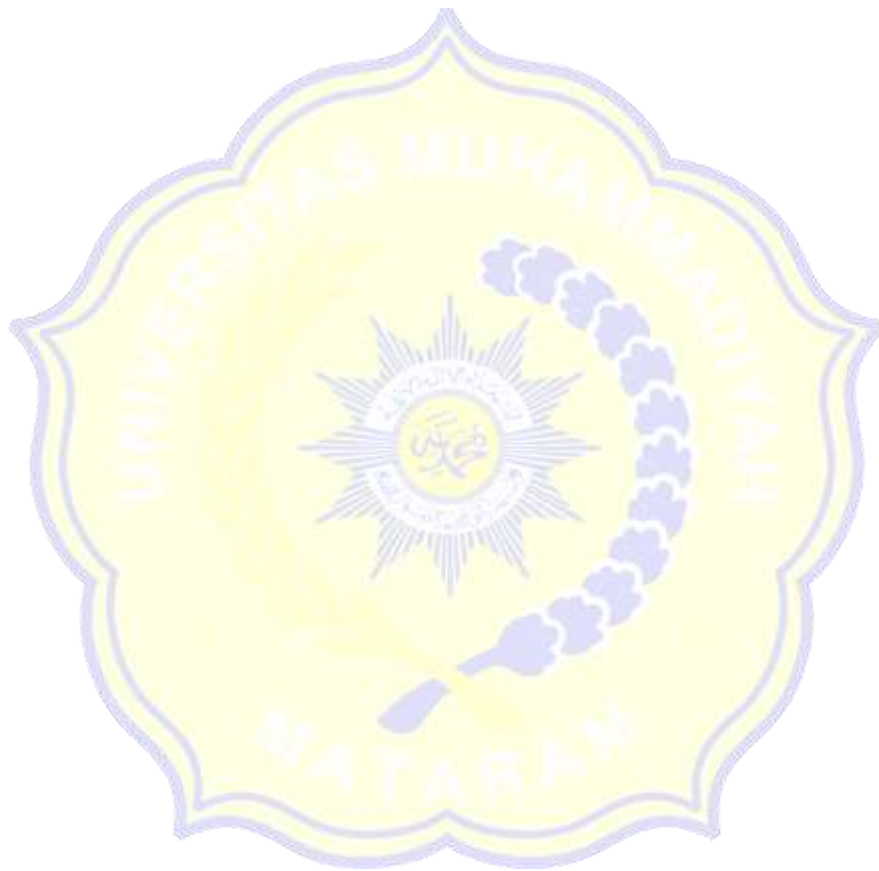
5. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau solusi kepada Dinas Sosia Kota Mataram dan

masyarakat tgentang upaya mengurangi angka masalah sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota mataram.

6. Manfaat Akademis

Merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian program Strata Satu (S1) pada program studi Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

KAJIAN TEORI

F. Pengertian dan Konsep Implementasi Program

1. Implementasi Program

Menurut Oemar Hamalik penulis buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak secara maksimal, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap, Hamalik (2007: 237). Dengan demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Senada dengan hal tersebut, dalam *oxford advance learner's dictionary* sebagai yang dicatat oleh Oemar Hamalik penulis buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa “implementasi adalah “put something into effect” atau penerapan sesuatu yang memberikan efek”, Hamalik (2007: 237). Secara umum implementasi diartikan sebagai penerapan suatu kegiatan yang berdampak baik bagi pelaksanaannya.

Menurut Joan L. Herman sebagaimana dikutip oleh Farida Yusuf Tayipnapi penulis buku yang berjudul Evaluasi Program, bahwa “Program ialah segala sesuatu yang di coba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”, Tayipnapi (2000:9).

Menurut Arikunto (1988:1-2) Penilaian Program Pendidikan merupakan kegiatan yang direncanakan, maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Sehingga program itu mempunyai tujuan dan keberhasilannya dapat diukur. Dengan demikian dapat dikatakan tiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin tahu sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Dalam pengimplementasian program tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu.

Dengan begitu kegiatan yang direncanakan memiliki arah dan tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan yang dapat diukur. Dalam melaksanakan program kegiatan haruslah memahami terlebih dahulu macam-macam program yang ditinjau dari berbagai aspek yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, sempitnya, pelaksana dan sifatnya. Penilaian program mengatakan bahwa:

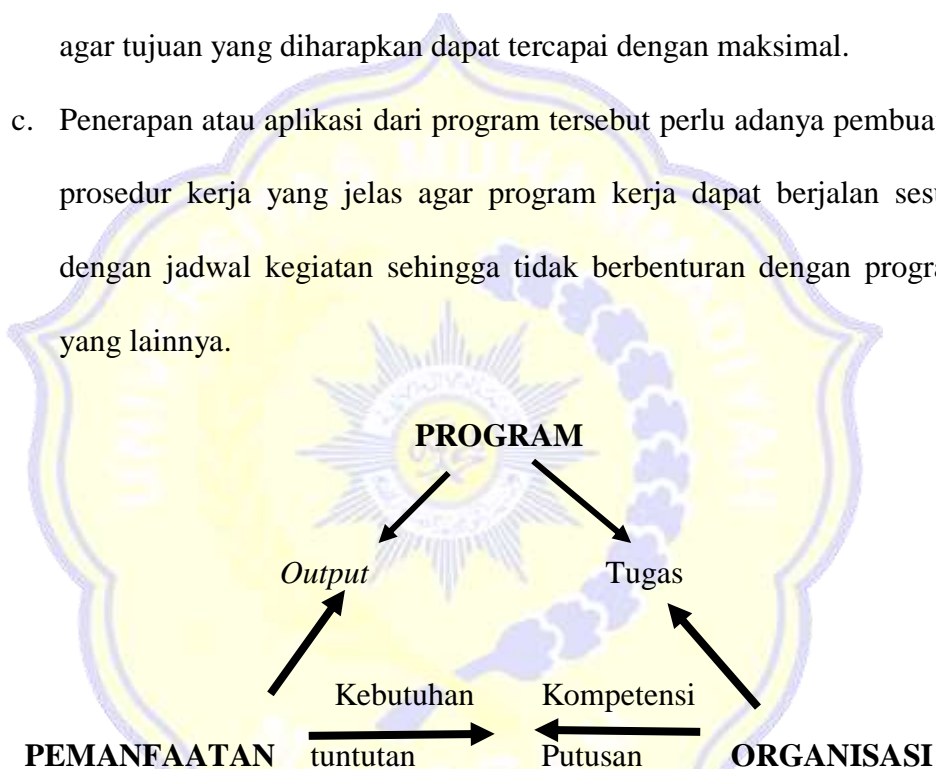
1. Ditinjau dari tujuannya, bahwa ada sejumlah program yang mencari keuntungan dan adapula yang dengan suka rela. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian program ditinjau berdasarkan tujuan tersebut.
2. Ditinjau dari jenis, yaitu ada program pendidikan, program koperasi, program kemasyarakatan, program pertanian dan sebagainya. Dalam mengklasifikasikannya didasarkan atas isi kegiatan program tersebut, sehingga jenis program cenderung kurang memberikan variasi atas penilaiannya.

3. Ditinjau dari jangka waktu, yaitu adanya program berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ukuran jangka waktu bagi suatu program sebenarnya agak relatif. Untuk menyederhanakan klasifikasinya, maka program berjangka satu tahun atau kurang, digolongkan ke dalam program jangka pendek, program kegiatan antara satu sampai lima tahun digolongkan ke dalam program jangka menengah, sedangkan kegiatan lima tahun atau lebih digolongkan sebagai program jangka panjang.
4. Ditinjau dari pelaksana, yaitu ada program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang, dan program besar yang dilaksanakan oleh berpuh bahkan beratus orang. Hal ini berpengaruh pada tinjauan pelaksana yang mampu menyelesaikan program dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Ditinjau dari sifatnya, ada program penting dan program kurang penting. Program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib orang bnayak mengenai hal yang vital, sedangkan program kurang penting adalah sebaliknya, Arikunto (1988:2-3).

2. Konsep Implementasi Program

Menurut Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Sehingga program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Sedangkan Menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana, (2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

- a. Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program, sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas yang berpengaruh besar pada kestabilan struktur organisasi.
- b. Interpretasi dari para pelaksana program harusnya mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.
- c. Penerapan atau aplikasi dari program tersebut perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program yang lainnya.



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Gambar 1. Model pengimplementasi Program

Salah satu model implementasi program yaitu seperti yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal oleh kalangan banyak adalah dengan model kesesuaian implementasi program, seperti:

David C. Korten mengungkapkan model ini dengan tiga elemen inti yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, seperti:

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu sebuah pencapaian dalam pengimplementasian program sangat memperhatikan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh pemanfaat program tersebut.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu program yang digunakan dalam sebuah organisasi mengatur dan memperhatikan keseimbangan antara tugas yang terdapat dalam program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu program yang ditawarkan harus sesuai antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

Dengan demikian, kegagalan suatu program sangat berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai. Program yang memiliki *output* sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran program harus memiliki syarat yang sesuai dengan ketetapan organisasi dan memperhatikan unsur-unsur implementasi kebijakan. Dengan demikian kesesuaian ketiga unsur pokok

dalam pengimplementasian program mutlak diperlukan agar bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.

Terkait dengan landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam Buku Maryono (2010: 43) mengungkapkan bahwa untuk bisa mengetahui apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik maka perlu ada kriteria yang diperhatikan, diantaranya:

- a. Bagaimana kesiapan unit pelaksana teknis?
- b. Dalam melaksanakan kebijakan. Apakah sesuai dengan tujuan, rencana, dan sasarannya?
- c. Bagaimana kesiapan pelaku utama dalam menerima tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan?
- d. Apakah koordinasi yang dilakukan telah maksimal?
- e. Apakah pelaksana kebijakan memahami hak dan kewajiban serta memahami tanggung jawabnya?
- f. Apakah penilaian dan kriteria keberhasilan sesuai prosedur pelaksana kebijakan secara jelas?

Jadi, berbagai pertanyaan di atas dapat menjadi bahan dan acuan dalam proses pencarian data di Dinas Sosial Kota Mataram dalam mendeskripsikan implementasi program perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis Kota Mataram. Sehingga, program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang

berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

G. Implementasi Kebijakan

6. Definisi Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (2006: 65) bahwa implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik pemerintahan dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Winamo, (2014:148) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang telah terjadi setelah penetapan Undang-Undang dan memberikan otoritas program dengan kebijakan dan mendapatkan keuntungan atau pun sebaliknya dalam bentuk nyata. Jadi, cakupan pengimplementasian program dengan sejumlah pelaku kebijakan oleh birokrat mempunyai tujuan agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Ripley dan Franklin, ada tiga cara yang dilakukan agar suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Dalam pengimplementasian program sebagai birokrat harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Memperhatikan fungsi dan selalu rutinitas dalam pelaksanaan sehingga tidak adanya masalah.

3. Memahami dampak dalam pelaksanaan sehingga dapat dikehendaki dengan terarah.

Jadi, dari berbagai perspektif tersebut dalam mendefinisikan sebuah kebijakan harus memperhatikan factor-faktor atau dampak yang membawa resiko dalam pengimplementasian program. Kepatuhan terhadap program melihat pada kelancaran pelaksana serta mengaplikasikan rutinitas fungsi dalam menghadapi kendala implementasi kebijakan, dengan demikian maka akan terwujud suatu kinerja yang baik dan pencapaian tujuan yang diinginkan.

7. Hakikat Implementasi Kebijakan

Menurut Mzmanian dan Sabatier dalam Widodo, (2010:87) hakekat implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau program yang telah dirumuskan. Suatu kebijakan yang berhasil diterapkan dapat berpengaruh dalam pemahaman masyarakat mengenai hal-hal baik nyata.

Dapat disimpulkan bahwa hakekat implementasi kebijakan merupakan serangkaian usaha yang di lakukan oleh pelaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga memperoleh hasil diharapkan.

8. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pembelajaran tentang implementasi pertama kali muncul sekitar tahun 1970, pada saat itu Jeffrey dan Aron Wildaysky, 1973 menerbitkan buku tentang *Implementatin* dan Erwin Hargrove, 1975 menerbitkan buku tentang *The Missing Link: The Study Of Implementation Of Social Policy*.

Pembelajaran tentang implemtasi mukai banyak dikenal ketika fakta menunjukkan berbagai intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial terbukti tidak efektif.

Erwin Hargrove mengungkapkan bahwa pembelajaran yang selama ini menitik beratkan pada pembuatan kebijakan dan evaluasi, sehingga mengabaikan sejumlah masalah implementasi. Sebagai bagian dari peran penting implementasi tentu memperhatikan bagaimana prosesnya dan memahami struktur administrasi kebijakan. Administrasi kebijakan dan hasil kebijakan sering dianggap sebagai masalah yang tidak berhubungan dengan formulasi kebijakan. Pada akhir tahun 1960-an orang-orang mulai menganggap bahwa mandate politik sudah jelas dan sesuai dengan prosedural kebijakan.

Adapun perbedaan pendekatan dalam teori implementasi yang berkaitan dengan hal berikut ini.

- a. Kebijakan atau jenis kebijakan, yaitu beragam isu yang menggambarkan bahwa formula kebijakan mengisaratkan sesuatu yang rumit dan kemudian melibatkan banyak pelaku. Kebijakan yang mencakup makna luas menghendaki sebuah perubahan yang besar pula dan berpengaruh besar terhadap pengimplementasiannya.
- b. Keragaman konteks kelembagaan, yaitu kebijakan menyangkut generalisasi yang dapat diterapkan pada sistem politik dan konteks Negara yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat diimplementasikan

dengan cara yang berbeda tergantung pada sistem politik serta kemampuan sistem administrasi Negara yang bersangkutan.

9. Pendekatan rasional *Top-Down* Dalam Implementasi Kebijakan

Pendekatan ini pertama kali muncul sekitar awal tahun 1970-an. Pendekatan ini bersifat *top-down*, yang mengasumsikan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan adalah langkah terbaik yang harus diusahakan dalam sebuah pencapaian hasil. Kemudian yang menjadi kontrol administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak.

Pendekatan ini mempunyai ciri yaitu memandang pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang sedang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan sebuah tindakan yang telah disepakati secara bersama dan terstruktur. Implementasi kebijakan merupakan proses administrasi yang terpisah dan penentuan kebijakan yang bersifat politik.

Jadi, implementasi secara keseluruhan mendorong pencapaian yang akurat dan maksimal dan satu kesatuan yang memiliki nilai yang utuh dalam pencapaiannya. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, harus dicari faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

10. Charles Edwards III Tentang Pendekatan Masalah Implementasi (1980)

Sejalan dengan perkembangannya bahwa karya Edwards III yang telah dituangkan dalam pengabdian, namun penulis asing khususnya

Amerika dan Inggris tidak pernah mengakui bahwa teori implementasi baik untuk diterapkan pada implementasi kebijakan. Hal demikian menjadi perhatian dari pemerhati implementasi Indonesia untuk menggunakan teori tersebut dalam setiap kebijakan dan berbanding terbalik dengan teori Van Meter dan Van Horn.

Van Meter dan Van Horn yang hanya konsep dibahasnya jauh lebih dalam dan operasional. Mungkin karena alasan inilah karyanya banyak dikutip di dalam negeri meskipun variabel-variabel yang ia ajukan hampir serupa, bahkan lebih sederhana dibandingkan dengan variabel-variabel yang diajukan oleh pendahulunya.

Edwards III mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul tentang *Implementing Public Policy* bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses tindakan berdasarkan hasil dan konsekuensi kebijaksanaan. Sedangkan aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dll.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kebijakan dalam pengimplementasi. Kelemahan kebijakan di Indonesia mempunyai faktor besar terhadap lemahnya komunikasi yang

berpengaruh luas pada hasil kebijakan dan pencapaian yang diharapkan oleh kebijakan tersebut.

Adapun indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1) **Transmisi**

Dalam pengimplementasian harusnya memperhatikan struktur atau alur kebijakan yang tepat sasaran. Transmisi dalam sebuah kebijakan mengharuskan agar pejabat tidak mempersulit disposisi dan tidak mempersulit komunikasi. Persoalan transmisi yang sering terjadi adalah ketika suatu kebijakan yang akan diimplementasikan berhadapan dengan susunan birokrasi berlapis sehingga jalur komunikasi ikut terhambat.

2) **Kejelasan**

Adanya kejelasan tujuan dari kebijakan sangat mempengaruhi pengimplementasian program, sehingga yang menjadi tujuan dari kebijakan dapat realisasi sesuai dengan tujuan yang sepakat bersama.

Ada pun beberapa penyebab kegagalan dalam merumuskan kebijakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif,
- b. Hadirnya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut,
- c. Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing dalam merumuskan kebijakan tersebut,

- d. Kurangnya memahami pokok permasalahan dalam merumuskan kebijakan,
- e. Biasanya akan terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

3) **Konsisten**

Konsisten adalah topik permasalahan selalu kongkrit dengan usaha penyelesaian, dengan kata lain tindakan selalu sama dengan apa yang diucapkan. Konsisten dalam sebuah kebijakan tentunya memperhatikan dampak pencapaian, sehingga implementasi kebijakan menghasilkan sesuai kesepakatan dan konsesus bersama.

Ada pun hal-hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya:

- a. Tidak adanya Kompleksitas kebijakan
- b. Munculnya kebijakan baru yang berbeda dengan pengimplementaiannya
- c. Adanya beragam tujuan dan bertentangan dengan kebijakan lain
- d. adanya kelompok kepentingan atas isu yang dibawah oleh kebijakan tersebut.

b. Sumber daya

Dalam pengimplementasian kebijakan megharuskan dan memperhatikan tujuan pencapaian program yang mendukung proses implementasi. Sumber daya merupakan hal yang sangat perlu sebagai bagian dalam serangkain proses implementasi kebijakan.

Adapun sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, yaitu staf, kewenangan implementor, dan fasilitas fisik.

c. Disposisi

Disposisi dalam kebijakan sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen dari pelaksana kebijakan dan merangsang komitmen. Unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan.
2. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3. Intensitas respons atau tanggapan pelaksanaan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan dan menekankan perlu adanya Standart Operating Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

H. Konsep Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan

Keberadaan dari anak jalanan, gelandangan dan pegemis di Kota Mataram juga harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Peraturan guna mewujudkan

perhatian tersebut melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Mataram yang memuat:

1. Penanganan, dalam Pasal 6 menjelaskan sebagai berikut:
 - a) Sebagai upaya penangan dari pemerintah kota mataram dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
 - b) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, Represif dan rehabilitatif.
2. Usaha Preventif. yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, dan/atau peningkatan pendidikan.
3. Usaha Represif yaitu penertiban dan pendampingan, penampungan sementara untuk diseleksi, dan/atau pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
4. Usaha Rehabilitatif dijelaskan seperti usaha penampungan, usaha seleksi, usaha penyantunan, usaha penyaluran, dan usaha tindak lanjut.

I. Penelitian Relevan

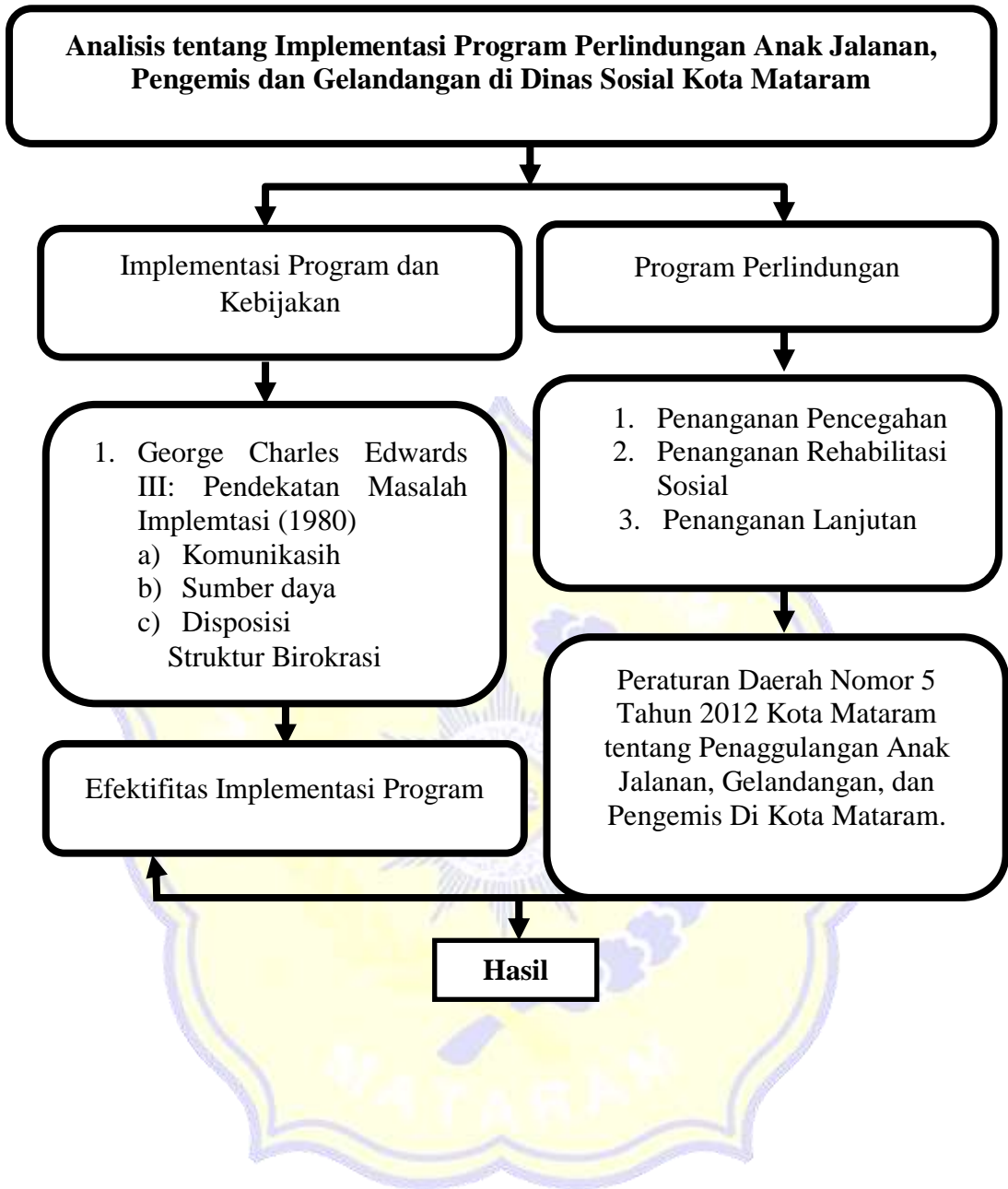
Untuk melengkapi ruang lingkup perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Mataram, maka perlu dikutip hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bidaya dan Ahmda Muzaini (2020), dengan hasil penelitian implementasi dari kebijakan pemerintah Kota Mataram tentang gelandangan dapat dibagi dua, yaitu keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tentang gelandangan antara lain: Perencanaan pembangunan rumah singgah di Kota Mataram dan Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Dinas Sosial dan Panti Sosial yang menampung gelandangan. Jadi, Pemerintah Kota Mataram sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang gelandangan, ada kebijakan yang dapat di implementasikan dan ada juga yang belum dapat di implementasikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi, dengan adanya kebijakan tersebut biasa mengatasi berbagai permasalahan gelandangan. Adapun kajian penelitian berikutnya dapat menjelaskan terkait implementasi pada bidang lainnya yang berkaitan dengan konflik sosial anak jalanan, persamaan Implementasi Kebijakan, Gelandangan, Dinas Sosial Kota Mataram, perbedaan Variabel Perlindungan Anak Jalanan Dan Pengemis.
2. Penelitian yang dilaksanakan Anasiru. (2011), adapun hasilnya adalah 1. Model kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga, model pendekatan berbasis masyarakat, dan model pendekatan berbasis semi panti sosial. Telah dilakukan oleh Pemerintah Makasar dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah maupun swasta dan juga masyarakat. 2. *Political will* serta kemauan keras Pemerintah Kota Makasar dalam hal ini Walikota Makasar dalam

upaya menanggulangi anak jalanan di Kota Makasar merupakan faktor pendukung dari instansi terkait untuk menindak lanjut dari *political will* dengan program yang memadai. 3. Faktor yang menghambat pelaksanaan program adalah belum adanya program yang tepat sasaran, serta dukungan dana dalam mendukung kelancaran program. 4. Penanggulangan anak jalanan yang dilakukan melalui model pendekatan yang dimaksud, tidak akan berjalan dengan lancar apa bila pelaksana program baik instansi pemerintah maupun swasta dan instansi terkait lainnya kurang dalam koordinasi. persamaan dalam penelitian ini adalah Implementasi dan Penanggulangan Anak Jalanan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah Penanggulangan Pengemis, Gelandangan dan Lokasi Penelitian.

J. Kerangka Berfikir Penelitian

Kejelasan alur dalam sebuah penelitian cukup penting untuk dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini dibutuhkan adanya gambaran konseptual untuk melancarkan alur penelitian. Penelitian ini yaitu Analisis Tentang Implementasi Program Perlindungan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Dinas Sosian Kota Mataram.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

G. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitiannya mendeskripsikan bagaimana Implementasi kebijakan program perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Dinas Sosial Kota Mataram dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data apa adanya dan sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data-data untuk di deskriptifkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berupa perilaku yang diamati, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2007:4).

H. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pendapat (Moleong, 2017:127) bahwa setiap situasi merupakan laboratorium di dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian berdasarkan observasi awal ditemukan adanya permasalahan sosial di Kota Mataram, seperti adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang semakin meningkat. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian Implementasi Program Perlindungan Anak Jalanan, pengemis dan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Mataram.

Maka lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Mataram selaku pelaksana dalam perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012.

I. Penentuan Informan dan Responden

Informan merupakan orang yang dapat dianggap mengetahui dengan baik terkait masalah yang akan diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Penelitian kualitatif posisi informan sebagai individu yang sangat penting, karena informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan sejumlah masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, Arikunto (2010:188).

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti memperoleh informasi dari informen yang dinilai mampu memberikan jawaban dan informasi yang benar dan akurat serta objektif.

Sebagai dasar dalam penentuan informan menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2017:168 adalah mencakup ciri-ciri umum seperti responsif, dapat menyesuaikan diri dan mempunyai wawasan tinggi dan memiliki kualitas keilmuan tentang kelembagaan. Adapun informen dalam penelitian ini :

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. SATGAS Dinas Sosial
- c. Anak jalanan, pengemis dan gelandangan Kota Mataram

J. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian pada hakikatnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif merupakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dan kalimat-kalimat.
- b. Data kuantitatif adalah jenis data yang menggunakan analisis statistik dalam penyajian data, Sugiyono (2010: 208).

Adapun jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, kalimat, dan tindakan, yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data lain-lain.

3. Sumber Data

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018: 225). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
- b) Sumber data sekunder adalah sumber mengutip dari sumber lain yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2018: 225).

Dalam penelitian ini maka data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara (*Interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti mengenai implementasi program perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Dinas Sosial Kota Mataram. Proses ini berlangsung dengan pengamatan langsung diantaranya melihat, merekam, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menjadi pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan langsung dengan tujuan tertentu dan menggunakan format pertanyaan yang terencana. Wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan data dari tangan pertama, sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu dengan menyiapkan apa menjadi

pokok-pokok masalah dan menuliskan tindak lanjut wawancara ke dalam catatan lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian dimasa lalu yang ditulis atau dicetak, dengan demikian dokumen juga dapat menghasilkan informasi yang melatar belakangi suatu kejadian dan aktivitas tertentu. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat dan pengambilan gambar secara langsung.

L. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan merupakan data primer maupun skunder, dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun data yang dianalisis merupakan gambaran teori dengan kondisi objektif berdasarkan temuan lapangan mengenai tentang implementasi program perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Mataram. Hal ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah dan tahapan tertentu yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan berdasarkan jenis data dan spesifikasinya. Analisis selanjutnya dengan metode kualitatif serta penjelasan yang mendukung dan kemudian dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.